



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA BPK RI
PADA
ACARA ULANG TAHUN KE-64
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
17 JANUARI 2011**

Yth. Wakil Ketua BPK dan Para Anggota BPK,
Yth. Para sesepuh: Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK,
Yth. Para Pejabat Struktural dan seluruh karyawan/karyawati BPK,
Yth. Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ke-64. Tak lupa kita semua patut bersyukur bahwa BPK telah menginjak usia ke 64 tahun.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Pada kesempatan peringatan hari ulang tahun BPK hari ini, saya ingin mengingatkan kembali tujuan pembentukan BPK sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang dituangkan dalam UUD 1945. Sebagaimana amanat Pasal 23 E UUD 1945 tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK melaksanakan tugas tersebut dalam kerangka untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pendirian BPK bertujuan untuk mengamankan pencapaian tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2011-2015, arah pengembangan BPK lima tahun ke depan difokuskan pada peningkatan peran BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mendukung tercapainya tujuan bernegara. Hendaknya hal ini benar-benar dipahami oleh para pegawai BPK sehingga punya tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Jika kita mengevaluasi perjalanan BPK sejak amandemen UUD 1945, kita dapat melihat bahwa BPK telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Terlebih sejak diterbitkannya tiga undang-undang di bidang keuangan negara pada tahun 2003—2004, serta penetapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menegaskan peran BPK sebagai satu-satunya pemeriksa keuangan negara.

Dukungan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan perwujudan kepercayaan rakyat kepada BPK. Pada perkembangannya dewasa ini, BPK telah meningkatkan kualitas proses pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya. BPK mampu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) secara reguler dan tepat waktu. IHPS tersebut telah menjadi salah satu dokumen yang sangat diperlukan tidak saja oleh DPR, DPD, dan DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasannya, tetapi juga oleh masyarakat, media massa, dan pemilik kepentingan lain dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemerintah juga menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan untuk memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK bersyukur bahwa saat ini opini BPK atas laporan keuangan entitas pengelola keuangan negara menjadi salah satu tolok ukur dan sinyal keberhasilan bagi suatu entitas dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini semua entitas di tingkat pusat maupun daerah berlomba agar laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Fenomena ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPK dalam membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang baik dan benar.

Demikian pula bagi penegak hukum, laporan BPK menjadi masukan yang sangat penting untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Saat ini, sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang maju ke meja hijau, awalnya berasal dari temuan pemeriksaan BPK. Pada tahun 2010 BPK telah menyerahkan 62 temuan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp457,01 miliar.

BPK berharap dengan semua perkembangan positif tersebut, BPK mampu mendorong perwujudan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, harapan bagi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan negara dapat lebih cepat terwujud.

Saudara-saudara yang berbahagia,

BPK secara konsisten juga akan terus berupaya untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inisiatif ini dilakukan BPK antara lain dengan menandatangani kesepakatan bersama dengan para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia mengenai tata cara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Selama tahun 2010, BPK sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan 488 DPRD dari 524 DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari 32 Provinsi di Indonesia. Pada awal tahun ini diharapkan seluruh DPRD sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan BPK. Melalui kesepakatan bersama tersebut, BPK memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada DPRD di masing-masing provinsi, kabupaten maupun kota untuk berkonsultasi dengan BPK terkait tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

Kepada Kepala Perwakilan dan segenap komponen perwakilan BPK di daerah, saya berharap saudara-saudara mampu menjalankan dengan baik hasil-hasil kesepakatan dengan DPRD. Pergunakanlah sebaik-baiknya forum konsultasi dengan pimpinan DPRD sebagai upaya untuk membantu DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasannya guna memperbaiki pengelolaan keuangan di daerah.

Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,

BPK menyadari bahwa upaya mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BPK. Diperlukan sinergi antara BPK dan lembaga negara/instansi yang mengelola keuangan negara untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, tanpa harus mencampuri tugas dan fungsi masing-masing.

Oleh karena itu, pada pertemuan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, 21 Januari 2010 lalu, saya selaku Ketua BPK menyampaikan Konsep "BPK Sinergi" guna mengatasi persoalan negara di bidang pengelolaan keuangan negara. Syukur *Alhamdulillah*, konsep tersebut diterima dengan baik oleh para Pimpinan Lembaga Negara. Bagi BPK sendiri, sinergi juga dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan BPK. Semua itu adalah dalam rangka mencapai kualitas hasil pemeriksaan yang sebaik-baiknya sesuai dengan harapan pemilik kepentingan (*stakeholders*).

Sinergi yang saya maksud adalah pembentukan pusat data elektronik BPK yang merupakan gabungan antara data elektronik internal BPK (*e-BPK*) dan data elektronik yang dimiliki *auditee* (*e-auditee*) baik yang berupa data keuangan maupun data non keuangan. Pembentukan pusat data melalui strategi *link and match* tersebut dimaksudkan agar BPK dapat setiap saat melakukan pemeriksaan secara elektronik (*e-audit*) di tempat kedudukan kantor-kantor BPK. Hal ini selain akan mempermudah, menghemat dan mengefektifkan proses pemeriksaan, juga akan memperluas cakupan pemeriksaan BPK dan mempercepat waktu penyusunan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada para pemangku kepentingan.

BPK mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara; 4) mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK; dan 5) mengoptimalkan pemeriksaan kinerja. Apabila inisiatif BPK Sinergi tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi pengelolaan keuangan negara akan lebih cepat terwujud.

Sejak 3 Juni 2010 hingga saat ini, sudah ada 39 entitas yang terdiri dari 6 lembaga negara, 15 kementerian, 4 BUMN, BI, LPS, dan PPATK yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPK dalam kerangka pembentukan pusat data BPK. Direncanakan pada waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga yang lain.

Sisi lain pentingnya konsep ini adalah bahwa peningkatan efektifitas pemeriksaan BPK melalui "BPK Sinergi" merupakan langkah konkret dari implementasi reformasi birokrasi di lingkungan BPK. Melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD, BPK mengajak institusi-institusi tersebut untuk juga mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungannya masing-masing.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang berbahagia,

Dalam aspek pengelolaan keuangan negara, penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan satu hal yang penting. Namun penyajian laporan keuangan secara wajar saja, tidaklah cukup. Entitas pengelola keuangan negara juga harus menjamin bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakannya benar-benar efisien dan efektif.

Disinilah arti pentingnya pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK. Sejalan dengan semakin meningkatnya perolehan opini atas laporan keuangan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka pada Rencana Strategis Tahun 2011-2015, BPK akan meningkatkan pemeriksaan kinerja.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, Pemeriksaan kinerja BPK diarahkan untuk menilai kinerja pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang berpotensi merugikan keuangan negara atau korupsi. Hasil pemeriksaan kinerja ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam memperbaiki *instrument* pencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Rencana BPK ini sejalan dengan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada BPK pada saat acara penyerahan DIPA Tahun 2011 di Istana Negara pada tanggal 28 Desember lalu. Pada saat itu, Presiden meminta BPK, sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPK melakukan langkah-langkah preventif membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Rencana kerja sebagaimana kita tuangkan dalam Renstra BPK 2011-2015 akan tercapai dengan baik apabila didukung dengan SDM yang mau dan mampu melaksanakan Renstra tersebut. Oleh karena itu, dalam Renstra tersebut termasuk pula rencana untuk meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen BPK. Terkait dengan hal ini, pendidikan berkelanjutan kepada pegawai BPK, baik yang bertugas sebagai pemeriksa maupun non pemeriksa, harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan.

Dukungan lingkungan kerja juga harus menjadi perhatian utama agar pegawai merasa nyaman bekerja di BPK. Kebijakan remunerasi bagi pegawai BPK harus tetap diteruskan, mudah-mudahan dengan jumlah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Pada kesempatan ini, Pimpinan dan para Anggota BPK mohon dukungan doa dari para pelaksana BPK agar upaya untuk mengusulkan perolehan remunerasi 100% dapat segera disetujui oleh pemerintah.

Di samping itu, kepastian akan peningkatan karir juga harus dibuka kepada setiap pegawai. Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan atau promosi, sepanjang dia memberikan prestasi yang baik dalam melaksanakan tugasnya. BPK tidak menghendaki adanya "*like and dislike*" dalam memberikan promosi kepada pegawai. Siapa yang berprestasi pasti akan diberikan promosi, sementara siapa yang melanggar ketentuan akan menerima sanksi. Terkait hal ini, yang penting dilakukan oleh setiap pegawai adalah bekerja dengan *keras, cerdas, ikhlas, dan peduli* dengan lingkungannya. *Insya Allah*, Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan yang terbaik bagi pegawai tersebut.

Terkait dengan penggunaan anggaran BPK, saya meminta agar para pelaksana BPK menggunakan anggaran negara yang diberikan kepada BPK dengan sebaik-baiknya. Sejak beberapa tahun terakhir, BPK selalu menerima anggaran yang terus meningkat jumlahnya. Gunakan anggaran tersebut secara efisien dan efektif agar tidak terjadi pemborosan apalagi penyimpangan keuangan. BPK harus menjadi contoh bagi instansi/lembaga yang lain untuk bisa menggunakan anggaran secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan BPK memang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hal ini tidak cukup. BPK juga harus mampu menggunakannya secara efisien dan efektif untuk menunjang tugas BPK.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Sebelum mengakhiri sambutan, saya mewakili BPK mengucapkan terima kasih atas kerja keras Saudara selama ini, serta dukungan dan kerja sama Saudara kepada kami. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para senior BPK, baik mantan Pimpinan dan Anggota BPK maupun para pensiunan pegawai BPK, serta pihak-pihak lain yang telah mendukung tugas BPK. Mudah-mudahan kita bersama bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih makmur.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam HUT BPK RI ke-64 ini. Dirgahayu BPK RI!

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Oom Çanti Çanti Çanti Oom

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,**

Drs Hadi Poernomo, Ak